



Bupati memotong tumpeng ulang tahun.

KR-Istimewa

Ultah, Bupati Ajak 'Sesarengan Mbangun Sleman'

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Kustini SP mendapat kejutan saat ulang tahun yang ke-61, Selasa (12/10). Kejutan dilakukan sebelum acara Rakorpim bulanan yang dihadiri Pejabat SKPD dan BUMD di Aula Lantai III Setda. Begitu Bupati memasuki ruangan, peserta rakorpim mempersembahkan lagu ulang tahun dan diteruskan dengan meniup lilin, memotong kue dan memotong tumpeng didampingi Wakil Bupati, Sekda dan para Assekda serta doa.

Wabup Danang Maharsa mewakili pejabat menyampaikan ucapan selamat dan berharap dalam usia 61 tahun ini Bupati Kustini diberi panjang umur, kesehatan dan dapat membimbing pejabat dalam bersama-sama menyelesaikan tugas *sesarengan mbangun Sleman*. "Selain itu dapat menjalankan program dan kegiatan yang diemban untuk mewujudkan Sleman yang lebih maju sejahtera dan lebih baik lagi," pesannya.

Sementara Bupati Kustini mengaku terharu atas perhatian dari Wakil Bupati, Sekda, Assekda dan jajaran pejabat lainnya. "Di usia 61 tahun yang seharusnya beristirahat, namun saya harus menjalankan tugas untuk menjalankan amanah memimpin Sleman. Amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan mohon dukungan dari semua pihak. Bantuan dan dukungan dari birokrasi yang sudah baik, tentu roda pemerintahan dan pembangunan Sleman akan berjalan baik," ujarnya.

Menurut Bupati, Sleman maju karena sudah baik dan birokrasi juga sudah tertata dengan baik. "Saya mengajak mari bersinergi dan kerja bareng memajukan pendidikan, ekonomi dan kesehatan untuk mewujudkan Sleman yang semakin sejahtera," ajaknya. (Has)-f

Pembab Sleman Hapus Denda PBB

SLEMAN (KR) - Pembab Sleman menghapus denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 31 Desember 2021. Alasan penghapusan denda pajak tersebut karena sekarang ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Sedangkan capaian PBB sudah mencapai 95 persen.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman H Haris Sutarta SE MT menjelaskan, penghapusan denda tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No 57/Kep.KDH/A/2021 tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak terutang PBB pedesaan dan perkotaan. Penghapusan denda itu berlaku sampai 31 Desember 2021.

"Sebelumnya ada aturan bahwa setelah 30 September 2021 akan terkena denda 2 persen setiap bulannya. Tapi dengan adanya keputusan Bupati Sleman, denda administrasi dihapus," kata Haris di kantornya, Selasa (12/10).

Kebijakan penghapusan denda pajak

tersebut karena sekarang ini masih dalam pandemi Covid-19. Harapannya dengan tidak adanya denda administrasi PBB, capaian perolehan PBB bisa lebih maksimal atau 100 persen dari target yang ditetapkan. "Situasi pandemi menjadi pertimbangan pemerintah untuk menghapus denda pajak PBB. Harapannya masyarakat yang belum membayar, segera melunasi PBB," pintanya.

Dikatakan, ketetapan PBB di Kabupaten Sleman sekitar Rp 86 miliar. Namun Pembab Sleman menargetkan perolehan PBB Tahun 2021 sekitar Rp 69,5 miliar. Sampai saat ini sudah tercapai 95 persen dari target yang ditentukan. Pihaknya optimis sampai akhir 2021, target bisa tercapai.

"Memang target yang kami tentukan tidak sebesar dari ketetapan. Soalnya tidak semua wajib pajak berada di Sleman dan ada beberapa data yang perlu pembenahan. Semoga perolehan pajak PBB bisa tercapai atau bahkan melebihi target," pungkaskannya. (Sni)-f

Komisi B Minta Pembukaan Tempat Wisata Ditambah

SLEMAN (KR) - Komisi B DPRD Sleman meminta pembukaan tempat wisata terus ditambah. Dengan harapan nantinya dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung dari sektor pariwisata.

Anggota Komisi B DPRD Sleman Sukanto SH mengatakan, sekarang ini baru beberapa tempat pariwisata yang dibuka oleh pemerintah. Dengan penurunan jumlah kasus Covid-19, pihaknya berharap lebih banyak lagi tempat wisata dibuka selebar-lebarnya. Soalnya sudah banyak masyarakat yang ingin berwisata untuk melepas kejenuhan selama PPKM," katanya, Selasa (12/10).

Alasan lain, lanjut Sukanto, banyak warga Sleman ini hidupnya bergantung dari sektor pariwisata. Dengan banyak tempat

wisata yang dibuka, orang yang berkunjung ke Sleman akan semakin besar. "Sektor pariwisata ini mempunyai multi efek yang besar terhadap ekonomi. Kalau pariwisatanya berjalan dengan baik, ekonomi masyarakatnya juga akan meningkat juga," ucap Ketua Fraksi Golkar ini.

Meski demikian, Komisi B juga mengingatkan, sebelum membuka tempat wisata harus memperhatikan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Hal itu untuk meminimalisasi terjadinya penularan Covid-19 di Kabupaten Sleman. "Pembukaan tempat pariwisata ini harus diikuti dengan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Makanya sarana dan prasarana harus disediakan dulu. Supaya kelonggaran berwisata ini tidak menjadi tempat penularan Covid-19," pintanya. (Sni)-f

Vaksinasi Kerja Sama ITNY - Pangkalan TNI AL



KR - Jayadi Kastari

Pembukaan vaksinasi ditandai tukar cenderamata.

SLEMAN (KR) - Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) bekerjasama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta mengadakan Vaksinasi Covid-19 di Auditorium ITNY Babarsari, Selasa (12/10). Hadir dan memberi sambutan Wakil Komandan TNI AL Yogya-

persen masyarakat sekitar. Vaksinasi Kedua, besok Rabu 13 Oktober," ujarnya, seraya menyebut kerja sama dengan TNI AL vaksinasi tahap 1 dengan jenis vaksin Sinovac.

Sedangkan Ircham mengatakan, vaksinasi dalam upaya menyiapkan kuliah secara luring November mendatang. "Kuliah luring semua mahasiswa harus sudah vaksin," ucapnya.

Ditambahkan Sigit, jumlah kuota vaksin 800 namun peserta 448 orang. "Hal ini dikarenakan pelaksanaan vaksin yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 27 September diundur menjadi 12 Oktober. Sehingga banyak masyarakat yang sudah mendaftar, tapi vaksin di tempat lain," katanya. (Jay)-f

MEKANISME PEMBELIAN RUMIT

Rendah, Realisasi Penebusan Pupuk Bersubsidi

SLEMAN (KR) - Realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Sleman masih di bawah 50 % dengan terbanyak pada pupuk urea, lalu diikuti pupuk NPK dan ZA. Ada beberapa penyebab rendahnya realisasi penebusan pupuk bersubsidi ini.

"Kemungkinan pertama, kartu tani yang diberikan tahun 2017 sudah banyak yang *keilingsut*, rusak atau hilang. Sementara perbaikan atau pembaharuan kartu tani sangat tergantung pada institusi lain yaitu BRI. Selain itu proses yang harus melalui kehilangan lapor polisi membuat petani enggan mengurus," ungkap Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono kepada KR, Selasa (12/10).

Penyebab lainnya, menurut Suparmono dimungkinkan karena kuota pupuk pada kartu tani kosong, serta ketersediaan EDC dan kemampuan KPL dalam penggunaan mesin gesek atau EDC sementara mereka sudah tua-tua. Selain itu juga kebiasaan petani tidak membawa kartu tani dan KTP bila bepergian sementara petani membeli pupuk langsung dibawa ke sawah. Sehingga apabila lupa mereka langsung membeli

pupuk nonsubsidi yang harganya terjangkau.

Suparmono juga menyebutkan kasus-kasus yang muncul terkait pembelian pupuk tersebut. Menurutnya, petani membeli pada kios yang tidak ditentukan sehingga pasti mendapat pupuk nonsubsidi. Dengan kasus seperti ini muncul keluhan pupuk langka, padahal sebenarnya tersedia tapi pada KPL yang ditentukan.

Kemudian pembelian dengan kartu tani seharusnya dengan menabung lebih dulu di bank atau dengan membawa uang cash yang diserahkan pada KPL. Untuk penebusannya pihak KPL mentransfer uangnya ke kartu tani, yang biasa-

nya dikenakan biaya administrasi minimal Rp 3.000. Biaya ini menjadi beban bagi petani karena menambah biaya pembelian. Apalagi adanya biaya tambahan berupa biaya angkut (Rp 4.000 - Rp 5.000) persak apabila minta diantar.

"Semua ini menjadi beban bagi petani, apalagi akhir-akhir ini harga jual yang tidak mendukung. Subsidi pupuk meski tujuannya untuk meningkatkan produksi pertanian tapi mekanisme pembelian yang rumit menjadi beban petani. Mungkinkah kebijakan subsidi pupuk diubah, bisa subsidi langsung kepada petani atau subsidi harga panen," kata Suparmono. (Has)-f

OPERASI BKC ILEGAL

Petugas Sita 4 Bungkus Tembakau Iris

SLEMAN (KR) - Petugas gabungan dari Bea Cukai, Disperindag, Satpol PP dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman melakukan razia rokok ilegal, Selasa (12/10). Operasi bersama Barang Kena Cukai (BKC) ilegal menyasar pasar, toko kelontong dan toko tembakau di wilayah Kapanewon Tempel, Turi, dan Pakem.

"Operasi bersama BKC ilegal ini dalam rangka pengendalian peredaran BKC hasil tembakau ilegal di Kabupaten Sleman dengan sasaran produk hasil tembakau seperti rokok (sigaret), cerutu, rokok daun, HTPL, hingga tembakau iris di distributor maupun pengecer," kata Pemeriksa Bea dan Cukai KPPBC TMP Yogyakarta Yusron Asrofi.

Pada Operasi Bersama BKC Hasil Tembakau Ilegal, petugas menyita 4 bungkus tembakau iris yang dibungkus dalam kemasan 50 gram.



KR-Istimewa

Petugas memeriksa tembakau iris ilegal.

Seluruh barang tersebut tidak dilekati pita cukai yang didapat dari toko tembakau di wilayah Kapanewon Pakem.

"Indikator BKC hasil tembakau

ilegal antara lain tanpa pita cukai, pita cukai bekas, pita cukai palsu, salah peruntukan dan personalisasi (tidak sesuai kode pita cukai) tembakau," jelas Yusron. (Has)-f

Kedaulatan Rakyat

EPAPER

www.kr.co.id



Berlangganan
Scan Barcode



Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.